

PENGARUH DANA DESA DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

MAMAN KURNIAWAN SYAHPUTRA SILABAN



**ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN
PERDESAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**



PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pengaruh Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Barat” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2025

Maman Kurniawan Syahputra Silaban
H0501211005

RINGKASAN

MAMAN KURNIAWAN SYAHPUTRA SILABAN. Pengaruh Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Dibimbing oleh NUNUNG NURYARTONO dan EKA INTAN KUMALA PUTRI.

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional, terutama di wilayah timur Indonesia yang relatif tertinggal seperti Provinsi Papua Barat. Pada September 2024, tingkat kemiskinan di provinsi ini mencapai 21,09%, lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional sebesar 8,57%. Secara absolut, jumlah penduduk miskin tercatat 108,28 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp 816.613 per kapita per bulan, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya biaya hidup, hambatan logistik, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan layanan dasar. Selama 2015–2024, penurunan kemiskinan di Papua Barat hanya sebesar 6,62% poin (dari 30,47% menjadi 23,85%), jauh tertinggal dibandingkan capaian nasional.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menyalurkan dua instrumen fiskal utama: Dana Desa yang mulai digulirkan pada 2015 dan Dana Otonomi Khusus yang berlaku sejak 2002. Alokasi Dana Desa meningkat dari Rp 449,32 miliar pada 2015 menjadi Rp 1,40 triliun pada 2024, sementara Dana Otonomi Khusus mencapai Rp 1,79 triliun pada 2024. Keduanya diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, data menunjukkan bahwa kenaikan alokasi tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan yang signifikan dan merata antar kabupaten. Sebagian daerah tetap mencatat tingkat kemiskinan di atas 29% meski menerima tambahan dana besar, sedangkan beberapa kabupaten dengan alokasi lebih rendah mampu menurunkan kemiskinan secara relatif lebih baik.

Penelitian ini bertujuan: (a) menganalisis pengaruh Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus tahun berjalan terhadap rasio penduduk miskin (%) dan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Papua Barat; (b) menguji efek tertunda (*lag t-1*) dari kedua dana terhadap kedua indikator kemiskinan; dan (c) mengidentifikasi perbedaan pengaruh antar kabupaten serta memetakan kinerjanya secara spasial. Variabel kontrol meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB).

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan inferensial berbasis data panel 12 kabupaten periode 2015–2024. Dua indikator kemiskinan dianalisis: rasio penduduk miskin (%) dan jumlah penduduk miskin (jiwa). Pemilihan model terbaik melalui *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Breusch–Pagan LM Test* menghasilkan *Random Effect Model* (REM) untuk rasio kemiskinan dan *Fixed Effect Model* (FEM) untuk jumlah penduduk miskin. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model memenuhi kriteria BLUE, dengan *robust standard error* digunakan untuk mengatasi potensi pelanggaran asumsi.

Hasil menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan pada tahun berjalan maupun efek tertunda. Pada model tahun berjalan, setiap tambahan Rp 1 miliar Dana Desa menurunkan rasio kemiskinan sebesar 0,006% poin dan mengurangi jumlah penduduk miskin sekitar 9 jiwa. Efek

tertunda menunjukkan penurunan rasio kemiskinan sebesar 0,012% poin dan pengurangan 11–12 jiwa pada tahun berikutnya. Sebaliknya, Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kedua indikator, baik pada tahun berjalan maupun efek tertunda.

Variabel kontrol memperlihatkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio kemiskinan, sementara Rasio Gini berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. TPT dan PDRB tidak signifikan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pasar kerja belum inklusif bagi rumah tangga miskin dalam jangka pendek.

Analisis spasial berbasis FEM mengungkap heterogenitas antar kabupaten. Untuk Dana Desa, Kabupaten Manokwari, Sorong, Teluk Bintuni, dan Fakfak memiliki *fixed effect* tertinggi, menandakan beban kemiskinan absolut lebih besar setelah mengontrol variabel model. Sebaliknya, Tambrau, Manokwari Selatan, dan Sorong Selatan memiliki *fixed effect* negatif, mencerminkan jumlah penduduk miskin relatif lebih rendah dari rata-rata provinsi.

Heterogenitas juga terlihat pada Dana Otonomi Khusus. Kabupaten dengan alokasi tinggi seperti Sorong dan Teluk Bintuni tidak selalu menunjukkan kinerja penurunan kemiskinan yang memadai, sementara Raja Ampat dan Kaimana mampu mencatat kinerja lebih baik meskipun alokasinya tidak tertinggi. Hal ini menegaskan bahwa besarnya alokasi belum otomatis efektif, dan efektivitas sangat dipengaruhi fokus program, kapasitas kelembagaan, serta tata kelola.

Pemetaan kuadran Dana Desa–kemiskinan dan Dana Otonomi Khusus–kemiskinan menghasilkan empat kategori kinerja: kuadran I (alokasi tinggi–kemiskinan tinggi), kuadran II (alokasi rendah–kemiskinan tinggi), kuadran III (alokasi rendah–kemiskinan rendah), dan kuadran IV (alokasi tinggi–kemiskinan rendah). Pergeseran posisi kabupaten antar kuadran menunjukkan bahwa kinerja tidak linier dan dipengaruhi faktor non-fiskal seperti aksesibilitas wilayah, kualitas belanja publik, serta efektivitas penyaluran program.

Penelitian ini menegaskan bahwa Dana Desa lebih efektif dibandingkan Dana Otonomi Khusus dalam mengurangi kemiskinan di Papua Barat, dengan efek tertunda yang konsisten. Ketidakefektifan Dana Otonomi Khusus diduga terkait desain *block grant* yang kurang terarah pada rumah tangga miskin, lemahnya tata kelola, dan terbatasnya kapasitas birokrasi. Implikasi kebijakan meliputi peningkatan alokasi Dana Desa berbasis jumlah penduduk miskin dan kinerja, penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal, serta reformasi tata kelola Dana Otonomi Khusus untuk memperjelas fokus *pro-poor* dan memperketat pengawasan.

Kata kunci: Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, Data Panel, Kemiskinan, Papua Barat

SUMMARY

MAMAN KURNIAWAN SYAHPUTRA SILABAN. The Effect of Village Funds and Special Autonomy Funds on Poverty in West Papua Province. Supervised by NUNUNG NURYARTONO and EKA INTAN KUMALA PUTRI.

Poverty remains a strategic development issue in Indonesia, particularly in the eastern regions that are relatively underdeveloped, such as West Papua Province. As of September 2024, the provincial poverty rate reached 21.09%, more than twice the national average of 8.57%. In absolute terms, there were 108.28 thousand poor residents, with a poverty line of IDR 816,613 per capita per month—significantly higher than the national poverty line. This condition reflects the high cost of living, logistical barriers, limited infrastructure, and service delivery challenges in the region. From 2015 to 2024, the poverty rate in West Papua declined by only 6.62% points (from 30.47% to 23.85%), lagging far behind the national pace of poverty reduction.

To accelerate development and reduce poverty, the central government has allocated two main fiscal transfer instruments: Village Funds (VF), introduced in 2015, and Special Autonomy Funds (SAF), which have been implemented in Papua since 2002. The allocation of Village Funds in West Papua rose from IDR 449.32 billion in 2015 to IDR 1.40 trillion in 2024, while Special Autonomy Funds reached IDR 1.79 trillion in 2024. Both funds are expected to stimulate basic infrastructure development, improve public services, and strengthen local economic empowerment. However, the increase in allocations has not always been accompanied by significant and evenly distributed poverty reductions. Some districts still record poverty rates above 29% despite substantial funding increases, while others with lower allocations have achieved relatively better outcomes.

This study aims to: (a) analyze the impact of current-year Village Funds and Special Autonomy Funds on the poverty ratio (%) and the absolute number of poor people (persons) in West Papua; (b) examine the lagged ($t-1$) effects of both funds on poverty indicators; and (c) identify differences in impacts across districts and spatially map their performance. Control variables include the Human Development Index (HDI), Gini Ratio, Open Unemployment Rate (OUR), and Gross Regional Domestic Product (GRDP).

A quantitative approach combining descriptive and inferential methods was applied using panel data for 12 districts from 2015 to 2024. Two poverty indicators were analyzed: poverty ratio (%) and the number of poor people (persons). Model selection through Chow, Hausman, and Breusch–Pagan LM tests determined the Random Effect Model (REM) for poverty ratio and the Fixed Effect Model (FEM) for the number of poor people. Classical assumption tests ensured that the models met BLUE criteria, and robust standard errors were applied to address potential violations.

The results show that Village Funds have a significant negative effect on poverty, both in the current year and with a lagged effect. In the current-year model, every additional IDR 1 billion in Village Funds reduces the poverty ratio by 0.006% points and decreases the number of poor people by approximately 9 persons. The lagged effect lowers the poverty ratio by 0.012% points and reduces poverty by



around 11–12 persons in the following year. Conversely, Special Autonomy Funds show no significant effect on either poverty indicator, in both the current year and lagged models.

Among the control variables, HDI has a significant negative effect on poverty ratio, while the Gini Ratio has a significant positive effect on the number of poor people. OUR and GRDP are not statistically significant, indicating that short-term economic growth and labor market improvements have yet to be inclusive for poor households in West Papua.

Spatial analysis based on FEM reveals heterogeneity in the impacts of Village Funds and Special Autonomy Funds across districts. For Village Funds, Manokwari, Sorong, Teluk Bintuni, and Fakfak have the highest fixed effects, indicating a greater absolute poverty burden after controlling for other variables. In contrast, Tambrauw, South Manokwari, and South Sorong show negative fixed effects, reflecting lower poverty levels relative to the provincial average.

Heterogeneity is also evident for Special Autonomy Funds. Districts with high allocations, such as Sorong and Teluk Bintuni, do not necessarily achieve substantial poverty reductions, whereas Raja Ampat and Kaimana show better outcomes despite lower allocations. This finding confirms that larger allocations do not automatically translate into effectiveness, with program focus, institutional capacity, and governance quality being decisive factors.

Quadrant mapping of Village Funds–poverty and Special Autonomy Funds–poverty identifies four categories of fiscal performance: Quadrant I (high allocation–high poverty), Quadrant II (low allocation–high poverty), Quadrant III (low allocation–low poverty), and Quadrant IV (high allocation–low poverty). Shifts in district positions across quadrants over time suggest non-linear performance, influenced by non-fiscal factors such as accessibility, public spending quality, and program delivery efficiency.

This study concludes that Village Funds are more effective than Special Autonomy Funds in reducing poverty in West Papua, particularly with consistent lagged effects. The limited effectiveness of Special Autonomy Funds is likely related to their block grant design, weak governance, and limited bureaucratic capacity. Policy implications include increasing Village Fund allocations based on the number of poor residents and performance, strengthening local economic empowerment programs, and reforming Special Autonomy Fund governance to clarify pro-poor priorities and tighten monitoring.

Keywords: Panel Data, Poverty, Special Autonomy Fund, Village Fund, West Papua



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

PENGARUH DANA DESA DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

MAMAN KURNIAWAN SYAHPUTRA SILABAN

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada
Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

**ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN
PERDESAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji pada Ujian Tesis:

1. Prof. Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, M.S.
2. Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si.

Judul Tesis : Pengaruh Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus Terhadap
Kemiskinan di Provinsi Papua Barat
Nama : Maman Kurniawan Syahputra Silaban
NIM : H0501211005

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si.
NIP. 196909091994031001



Pembimbing 2:
Prof. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.Si.
NIP. 196502121990032001



Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc.
NIP. 196204211986031003



Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec.
NIP. 197904222006041002



Tanggal Ujian:
(30 Juli 2025)

Tanggal Pengesahan: 11 AUG 2025



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian yang dilaksanakan pada Februari hingga April 2025 ini membahas peran Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus sebagai instrumen transfer fiskal dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini disusun dalam bentuk tesis berjudul “Pengaruh Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Barat”.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing, Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si. selaku Ketua Komisi dan Prof. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.Si. selaku Anggota Komisi, atas bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, M.S. selaku penguji luar komisi, serta Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si. selaku penguji perwakilan program studi pada ujian tesis. Tak lupa, penghargaan juga diberikan kepada pimpinan dan staf Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD) atas dukungan dan panduan yang diberikan selama masa studi.

Penulis juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada rekan-rekan mahasiswa PWD angkatan 2021 atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang diberikan, serta kepada teman, senior, junior, dan rekan kerja yang telah kebersamai penulis dalam penyelesaian studi, baik melalui bantuan materi, waktu, maupun motivasi. Ungkapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada ayah dan ibu tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti, serta kepada istri tercinta, Hesti Ratnasari Karo-Karo, yang senantiasa mendukung dan mendampingi penulis dengan penuh kesabaran, termasuk di masa kehamilan menjelang kelahiran putri pertama kami.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan.

Bogor, Agustus 2025

Maman Kurniawan Syahputra Silaban

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.6 Hipotesis	6
II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kemiskinan di Papua Barat	7
2.2 Kebijakan Fiskal dan Desentralisasi Fiskal	8
2.3 Transfer Fiskal di Indonesia (Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus)	10
2.4 Hubungan Transfer Fiskal dengan Pengentasan Kemiskinan	12
2.5 Penelitian Terdahulu	14
2.6 Kerangka Pemikiran	16
III METODE	18
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	18
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
3.3 Sumber Data dan Jenis Data	19
3.4 Definisi Operasional Variabel	20
3.5 Prosedur Penelitian	21
3.6 Model Analisis	23
3.7 Teknik Analisis Data	24
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Kondisi Sosial Ekonomi Papua Barat	26
4.2 Gambaran Statistik Variabel Penelitian	39
4.3 Hasil Estimasi Model Panel	49
4.4 Pengaruh Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus terhadap Rasio Jumlah Penduduk Miskin	52
4.5 Pengaruh Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Analisis Tingkat Kabupaten)	54
4.6 Efek Tertunda Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus terhadap Rasio Jumlah Penduduk Miskin (Model REM)	55
4.7 Efek Tertunda Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Model FEM)	57
4.8 Analisis Spasial Antar Kabupaten dan Pemetaan Kuadran Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus	59
4.9 Pembahasan Hasil Penelitian	67
V SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	78
RIWAYAT HIDUP	81



DAFTAR TABEL

1	Perbandingan Dana Desa, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan di 12 Kabupaten Provinsi Papua Barat Tahun 2015 dan 2024	3
2	Ringkasan Penelitian Terdahulu	14
3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	20
4	Luas Wilayah dan Jumlah Pulau per Kabupaten di Papua Barat (Sebelum Pemekaran)	30
5	Jumlah Distrik dan Desa per Kabupaten di Papua Barat	31
6	IPM per Kabupaten di Provinsi Papua Barat 2015-2024	32
7	TPT per Kabupaten di Provinsi Papua Barat 2015-2024 (persen)	33
8	Gini rasio per Kabupaten di Provinsi Papua Barat 2015-2024	35
9	PDRB per Kabupaten di Provinsi Papua Barat 2015-2024 (Rp Triliun)	36
10	Jumlah dan Rasio Penduduk Miskin per Kabupaten di Provinsi Papua Barat 2015 dan 2024	37
11	Ringkasan Statistik Variabel Penelitian pada 12 Kabupaten Provinsi Papua Barat, 2015–2024	39
12	Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Panel untuk Indikator Kemiskinan	49
13	Hasil Uji Multikolinearitas	50
14	Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
15	Hasil Uji Autokorelasi	51
16	Hasil Estimasi Regresi Panel REM terhadap Rasio Jumlah Penduduk Miskin (%)	52
17	Hasil Estimasi Regresi Panel FEM terhadap Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	54
18	Hasil Estimasi Regresi Panel REM Efek Tunda terhadap Rasio Jumlah Penduduk Miskin (%)	55
19	Hasil Estimasi Regresi Panel FEM Efek Tunda terhadap Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	57
20	Pemetaan Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Provinsi Papua Barat, 2015–2024	61
21	Pemetaan Dana Otonomi Khusus terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Provinsi Papua Barat, 2015–2024	61



DAFTAR GAMBAR

1	Skema Kerangka Pikir Penelitian	17
2	Peta Lokasi Penelitian	18
3	Tren Rata-rata Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus per Kabupaten di Provinsi Papua Barat (2015-2024) (Sumber: Diolah dari data BPK dan DJPK 2025)	42
4	Tren Rata-rata Rasio Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten di Provinsi Papua Barat (2015-2024) (Sumber: Diolah dari data BPS 2025)	43
5	Tren Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten di Provinsi Papua Barat (2015-2024) (Sumber: Diolah dari data BPS, 2025)	44
6	Scatter Plot Dana Desa dan Rasio Jumlah Penduduk Miskin (%), 2015-2024. (Sumber: Hasil Stata 2025)	45
7	Scatter Plot Dana Otonomi Khusus dan Rasio Jumlah Penduduk Miskin (%), 2015-2024. (Sumber: hasil Stata 2025)	46
8	Scatter Plot Dana Desa Versus Jumlah Penduduk Miskin (ribuan jiwa), 2015-2024.(Sumber: hasil Stata 2025)	47
9	Scatter Plot Dana Otonomi Khusus Versus Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa), 2015-2024. (Sumber: hasil Stata 2025)	48
10	Nilai <i>Fixed Effect</i> Kabupaten terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Model FEM), 2015–2024. (Sumber: hasil Stata 2025)	60

DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran 1 Hasil uji Hausman terhadap variabel rasio jumlah penduduk miskin (POVR)	78
2	Lampiran 2 Hasil Uji Breusch dan Pagan variabel rasio jumlah penduduk miskin (POVR)	78
3	Lampiran 3 Hasil uji Hausman terhadap variabel jumlah penduduk miskin (POVERTY)	79
4	Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas (VIF)	79
5	Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
6	Lampiran 6 Hasil Uji Autokorelasi	80